LAPORAN TAHUNAN ASPPUK 2013

Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Perempuan Usaha Kecil yang Adil Gendel

ASPPUK

Sekretariat Nasional ASPPUK

Jl. Waru, Pangkalan Jati V RT.003/005 No.20, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makassar, Jakarta Timur 13620 Telp. 021-29486890 Faks. 021-86611757 Email:asppuk@indo.net.id https://www.facebook.com/asppuk https://twitter.com/asppukemail:asppuk@indo.net.id website: www.asppuk.or.id

DAFTAR ISI

Daftar isi …… 2

Pengantar …… 3

Profil ASPPUK

1. Sejarah …… 5
2. Visi Misi dan Kegiatan …… 6
3. Struktur Organisasi …… 8
4. Anggota …… 10

Program

1. Mendorong Kebijakan Program Pengembangan Usaha Kecil-Mikro bagi Perempuan Miskin sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan …… 12
2. Penguatan Masyarakat untuk Terwujudnya Integritas dan Akuntabilitas Pemerintah …… 15
3. Memperkuat Kapasitas Perempuan Usaha Kecil Melalui Produksi Makanan yang Berkelanjutan …… 18
4. Program Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dari Kain Tenun-Tangan Ramah Lingkungan yang Dilakukan Perempuan Pengusaha di Indonesia ……... 21
5. Mendorong Kebijakan Ekonomi Kerakyatan yang Responsif Gender Untuk Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Miskin Melalui Penguatan *Multi-Stakeholders* yang Berpihak …… 23
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Pra-Sejahtera Melalui Bantuan Modal Bagi Perempuan Usaha Kecil (PUK) 25
7. Advokasi dan Jaringan
   - 7.1 UU Koperasi No. 12 Tahun 2012 dan Koalisi Demokratisasi Ekonomi …... 27
   - 7.2 *GERAK LAWAN WTO* …… 30
   - *7.3 Post MDG's* …… 32
   - 7.4 Jaringan CSR …… 33
   - *7.5* Pendidikan dan *Public Services* Jaringan *New Indonesia* …… 34
   - *7.6* Kewirausahaan Berbasis Komunitas …… 35
8. Pengembangan Media, Database dan Komunikasi
   - 8.1 Publikasi Situs …… 36
   - 8.2 Pengembangan Video Dokumenter …… 38
     - 8.2.1 Video Profil ASPPUK
     - 8.2.2 Tutorial "Proses Pembuatan Warna Alami untuk Tenun Tangan"
   - 8.3 Pengembangan *software* untuk Database Perempuan Usaha Kecil-Mikro …... 39
   - 8.4 Publikasi Buku …… 39

Laporan Keuangan 2013 …… 41

PENGANTAR

Tahun 2013 menjadi tahun penting bagi penguatan ekonomi perempuan di tingkat regional melalui pertemuan Konferensi APEC pada Oktober 2013. Momentum ini memberikan perspektif bagi ASPPUK sebagai organisasi jaringan yang konsen pada peningkatan kesejahteraan perempuan miskin. Data ASPPUK 2012 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 60% perempuan pelaku usaha kecil mikro yang berada pada kondisi miskin dan rentan miskin.

Untuk menurunkan angka kemiskinan dengan mensejahterakan perempuan melalui pengembangan usaha kecil mikro (UMK) yang adil dan setara, maka tampaknya perlu ada usaha keras, khususnya pemerintah di tingkat nasional hingga daerah. Hal ini untuk mengubah pola berpikir dari ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan yang berorientasi pada pasar bebas, menuju ekonomi kerakyatan yang memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan miskin.

Peran perempuan dalam peningkatan ekonomi lokal juga harusnya sejalan dengan hasil APEC 2013 yang difokuskan pada empat upaya pemberdayakan ekonomi perempuan. *Pertama*, adalah bagaimana meningkatkan akses terhadap permodalan, informasi pasar dan jaringan yang selama ini masih menghalangi perempuan memasuki ranah ekonomi inovatif serta meningkatkan kesempatan bagi perempuan dalam usaha mikro dan kecil untuk menuai manfaat dari peningkatan teknologi dan inovasi.

Kedua, meningkatkan daya saing perempuan dalam peluang bisnis sehingga usaha mereka dapat berkembang dari sektor permodalan informal ke formal, dari usaha kecil ke menengah dan lain sebagainya. *Ketiga*, faktor sosial-budaya perlu dipertimbangkan karena akan mempengaruhi kualitas hidup perempuan dan akhirnya berdampak pada kemampuan ekonomi perempuan. *Keempat*, mendorong kolaborasi lebih dekat dengan jaringan organisasi masyarakat sipil dan asosiasi usaha perempuan yang mengembangkan dan memperkuat perempuan menjalankan usaha mereka.

Mengacu pada hal tersebut, usaha yang dilakoni oleh perempuan miskin dalam pengembangan ekonomi lokal telah berkontribusi 53% pada Pendapatan Domestic Bruto (PDB). Sektor usaha mikro kecil perempuan ternyata mampu memperkuat pondasi ekonomi rakyat melalui kemampuannya dalam memanfaatkan potensi lokal dan mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Sejalan dengan hal diatas, ASPPUK sebagai salah satu kekuatan gerakan ekonomi rakyat berbasis perempuan usaha kecil mikro, sepanjang tahun 2013 telah melaksanakan program penguatan ekonomi rakyat meliputi program peningkatan kapasitas, advokasi, akses permodalan, dokumentasi terhadap seluruh kegiatan perempuan usaha kecil mikro dampingan ASPPUK di 5 wilayah Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara dan Bali, Sulawesi).

Demikian laporan tahunan lembaga ASPPUK kami susun sebagai sebuah pembuktian atas kerja dan kontribusi ASPPUK bagi pengembangan perempuan usaha mikro kecil di Indonesia.

Mia Ariyana
Sekretaris Eksekutif Nasional
Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)

PROFIL ASPPUK

1. *Sejarah*

Perempuan memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi peran dan kontribusi perempuan di bidang pengembangan ekonomi di negeri ini masih terabaikan. Hak-hak ekonomi perempuan masih kurang terfasilitasi dalam program pembangunan. Berdasarkan situasi tersebut, beberapa organiasi non pemerintah (Ornop) yang berfokus pada pemberdayaan perempuan usaha kecil-mikro menyelenggarakan sebuah lokakarya jaringan pada bulan Desember 1994.

Konsolidasi jaringan Ornop pemberdayaan perempuan ini merupakan bentuk dan upaya memperkuat pengembangan perempuan usaha kecil di Indonesia. Pada 11 Desember 1997, jaringan ini mengadakan Forum Nasional atau FORNAS pertama dan terbentuklah **Yayasan Pendamping Perempuan Usaha Kecil (YASPPUK)**. Seiring perjalanan waktu, Forum Nasional kedua yang terselenggara pada tanggal 24-27 Februari 2001 dan menyepakati perlunya merubah badan lembaga menjadi asosiasi, sehingga menjadi **Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil** atau disingkat **ASPPUK.**

Kini terdapat 54 LSM anggota yang bergabung dalam ASPPUK tersebar di 22 Provinsi. Untuk memudahkan pengorganisasian dan koordinasi nasional, struktur lembaga dalam ASPPUK dibagi kedalam 5 wilayah di Indonesia:

1. ASPPUK Wilayah Jawa
2. ASPPUK wilayah Nusa Tenggara
3. ASPPUK wilayah Sumatera
4. ASPPUK wilayah Kalimantan
5. ASPPUK wilayah Sulawesi.

Adapun struktur forum pengambilan keputusan dalam kelembagaan ASPPUK adalah melalui mekanisme pertemuan dan rapat yang terdiri dari:

1. Forum Nasional (FORNAS)
2. Forum Nasional Luar Biasa (FNLB)

3. Rapat Komite Eksekutif Nasional
4. Forum Wilayah (FORWIL)
5. Rapat Komite Eksekutif Wilayah

ASPPUK sebagai organisasi asosiasi LSM yang aktif mendampingi kelompok perempuan pelaku usaha kecil-mikro sejak tahun 1997, telah memfasilitasi jaringan perempuan usaha kecil-mikro melalui berbagai program kegiatan yang berbasiskan ekonomi rakyat. Suatu sektor yang berkontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi daerah dan nasional. Hingga tahun 2012, perempuan usaha kecil dampingan anggota ASPPUK berjumlah 2.125.800 dan tersebar di 22 propinsi; 148 kabupaten dan 2.086 kelurahan dan desa. Jumlah ini setara dengan 6,2% dari total pelaku UMK di Indonesia dari keseluruhan pelaku UKM sebesar 52.781.101. Angka ini merupakan Data statistik Kementrian Koperasi dan UMKM pada tahun 2011.

2. Visi, Misi dan Kegiatan

Visi :

- Terwujudnya PUK-Mikro yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan jender.

Misi :

- Memfasilitasi terbangunnya gerakan Perempuan Usaha Kecil-mikro yang berkesetaraan dan berkeadilan jender sebagai penguatan masyarakat sipil.
- Memperjuangkan terbangunnya sistem yang kondusif bagi proses demokratisasi yang berkesetaraan dan berkeadilan jender.

Program Kegiatan

- *Menfasilitasi dan menguatkan Ornop anggota asosiasi dalam advokasi, networking dan fund raising.*

  ASPPUK memfasilitasi pelatihan berperspektif kesetaraan gender, studi banding, studi pasar, pengorganisasian masyarakat dan hak politik perempuan sebagai masukan praktis

guna meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan Ornop anggota dalam mendampingi Perempuan Usaha Kecil (PUK).

- *Penguatan Perempuan Usaha Kecil-Mikro.*

  ASPPUK memperkuat PUK melalui ornop anggota. Mendampingi dan memfasilitasi PUK-Mikro melalui latihan, studi banding, workshop dan sebagainya dalam rangka meningkatkan kesadaran kritis. ASPPUK juga memfasilitasi PUK-mikro untuk membangun jaringannya sendiri, yakni Jaringan Perempuan Usaha kecil-mikro atau JARPUK di tingkat kabupaten/kota.

- *Membangun dan menguatkan Jaringan Pasar bagi Produk PUK-mikro*

  ASPPUK menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan memfasilitasi kemungkinan terjalinnya komunikasi pasar antar JARPUK.

- *Advokasi Kebijakan untuk Memperjuangkan hak dan kepentingan PUK-mikro.*

  ASPPUK turut melakukan kegiatan advokasi sebagai upaya pembelaan terhadap perempuan usaha kecil melalui penggalangan solidaritas, seminar, lokakarya, kajian kebijakan, audiensi, lobi dan membangun opini publik.

- *Networking*

  ASPPUK menjalin kerjasama dengan lembaga di luar anggota, baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai kepedulian pada perempuan usaha kecil.

3. Struktur Organisasi

KOMITE EKSEKUTIF NASIONAL (KEN)

Ketua	**Endang Susilawati** Yayasan PANCA KARSA, Nusa Tenggara Barat
Anggota	**Herculana Ersinta Herculana Ersinta** Yayasan DIANTAMA, Kalimantan Barat
	Zaenudin M. Zaini LPSELH, Aceh Utara

SEKRETARIAT NASIONAL (SEKNAS)

Sekretaris Eksekutif Nasional	**Mia Ariyana**
Deputy	**M. Firdaus**
Koordinator Keuangan Staf	**Leni Hartini** **Chusnul**
Koordinator Program Jaringan dan Kesadaran Kritis Perempuan	**Maeda Yoppy**
Koordinator ICT dan Litbang Staf	**Darmanto** **Farih**
Manajemen Office	**Rismawati**
Administrasi Umum	**Rahmalia**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

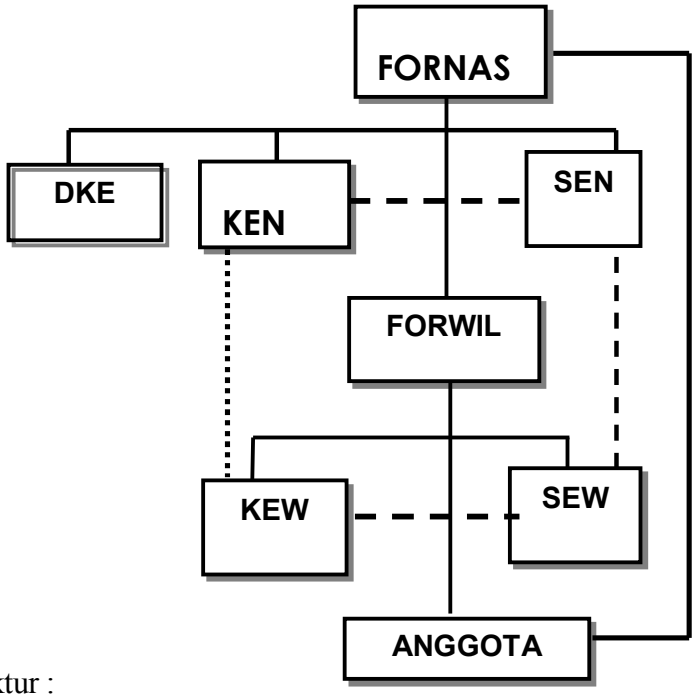

Keterangan Struktur :

- FORNAS adalah Forum Nasional, sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. Memilih Komite Eksekutif Nasional (KEN), Sekretaris Eksekutif Nasional (SEN) dan Dewan Kode Etik (DKE).
- Komite Eksekutif Nasional (KEN) adalah kelembagaan yang merupakan representasi anggota dari masing-masing wilayah yang ditetapkan dalam Forum Nasional (FORNAS) ASPPUK. Jumlah KEN adalah 5 (lima) orang yang mewakili 5 (lima) ASPPUK wilayah.
- Sekretaris Eksekutif Nasional adalah pelaksana harian program ASPPUK Nasional yang dibantu Deputy SEN dan beberapa orang staf, yang berkedudukan di Sekertariat Nasional, di Jakarta.
- Dewan Kode Etik (DKE) adalah kelembagaan yang dipilih dan ditetapkan dalam Forum Nasional ASPPUK yang bertugas merumuskan substansi dan instrumen penegakkan kode etik, serta memediasi konflik kelembagaan ASPPUK.
- Komite Eksekutif Wilayah adalah kelembagaan yang merupakan representasi anggota yang ditetapkan dalam Forwil. Ia terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili anggota di wilayahnya.
- Forum Wilayah (Forwil) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Forum Wilayah ASPPUK di wilayah. Ada 5 Forwil ASPPUK, yaitu: Nusa Tenggara,

Kalimantan Barat, Sumatera, Jawa dan Sulawesi.

- Sekretaris Eksekutif Wilayah (SEW) adalah pelaksana harian program ASPPUK wilayah, yang berkedudukan di masing-masing wilayah (5 wilayah).
- Anggota: Ornop dari seluruh Indonesia, berjumlah: 52 anggota, 40 partisipan, yang tersebar di 20 propinsi.

4. Anggota ASPPUK

Tabel Keanggotaan

	PPSW Sumatera
Aceh	LPSELH
	Perkumpulan Flower Aceh
Sumatera Utara	
	Perkumpulan Sada Ahmo
	Bitra Indonesia
	Yapidi
	Soripada
	Yayasan Penguatan Rakyat Pedesaan (Paras)
Sumatera Barat	LP2M
Bengkulu	PKBI-Bengkulu
Sumatera Selatan	Yayasan Kemasda
Bali	Maha Boga Marga (MBM)
Nusa Tenggara Barat	
	PSP

	LPMP
	LPSDM
	YPMP Madafaku
	KSU Annisa
	Yayasan Bina Cempe
	Yayasan Panca Karsa
	Konsepsi
	YKSSI
	Yayasan Santai
Nusa Tenggara Timur	
	Yayasan BinaSwadaya G. Soe
	Yayasan Alfa Omega
	Bengkel APPEK
Jakarta	PPSW Jakarta
Jawa Barat	PPSW Pasoendan
Jawa Tengah	Persepsi
	Yayasan Krida Paramita
	Yayasan Kristen Trukajaya

	LPTP
	YIS
	YPPSE
	LPPSLH
Yogyakarta	YP2SU
Jawa Timur	LP3M Algheins
Kalimantan Barat	PRCF Indonesia
	Yayasan Dian tama
	PPSW-Borneo
	Gemawan

Kalimantan Timur	Perkumpulan Nurani Perempuan
Sulawesi Selatan	LML
	Kombongan Sitoru
Sulawesi Tengah	KPPA
Sulawesi Tenggara	Alinsi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN)
	LAPPAM

PROGRAM

1. Mendorong Kebijakan Program Pengembangan Usaha Kecil-Mikro bagi Perempuan Miskin sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan

1.1 Latar Belakang

Program yang didukung oleh lembaga Pro Representasi (PROREP) ini berjalan dengan metode representasi, sebagai upaya untuk mempertemukan konstituen perempuan usaha kecil di Banda Aceh, Klaten dan Pontianak dengan pemerintah daerah dan Legislatif tingkat pusat maupun daerah (DPR RI/DPRD). Program dengan metode Representasi ini berjalan sejak bulan Juni 2012-April 2013 bertujuan untuk mendorong kebijakan program pengembangan usaha kecil-mikro bagi perempuan miskin sebagai strategi penanggulangan kemiskinan.

Program ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin, khususnya kelompok perempuan usaha kecil. Program ini memfasilitasi kelompok perempuan dampingan ASPPUK dan kelompok masyarakat lain juga untuk turut terlibat berdialog dan bernegosiasi dengan perwakilan lembaga Legislatif dan Esekutif. ASPPUK menyadari pentingnya untuk membekali para anggota dan kelompok perempuan usaha kecil di berbagai daerah agar memiliki kemampuan bernegosiasi dan *lobby* isu menyangkut perjuangan kepentingan mereka di lembaga pemerintahan daerah melalui perangkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Legislatif, baik itu DPR RI serta DPRD I dan II.

1.2. Kegiatan

Beberapa rangkaian kegiatan program Representasi ini adalah sebagai berikut; Penyusunan *Draft Tools/Framework Analysis* dan *Workshop* (dari persiapan hingga penyempurnaan), Studi dan Analisis, Konsolidasi Nasional dan Daerah, Advokasi meliputi Dialog, *Hearing* dan *Lobby* dengan SKPD, DPR RI/DPRD dan media pers. Rangkaian komponen kegiatan advokasi ini adalah melakukan analisis anggaran

APBN, yang hasilnya akan diajukan kepada pemerintah untuk memperkuat program pengurangan kemiskinan nasional.

Kegiatan TOT analisis dokumen anggaran dan kebijakan

Hasil temuan analisis di lapangan, perlu untuk melakukan pengembangan kajian mendalam mengenai feminisasi kemiskinan. Program ini berlangsung di Kabupaten Klaten melalui lembaga PERSEPSI, di Kota Pontianak melalui PPSW Borneo dan di kota Banda Aceh. Di tingkat nasional, rangkaian kegiatan representasi ini menjadi stimulus terbentuknya jejaring masyarakat sipil yang konsern terhadap peningkatan kesejahteraan kaum perempuan miskin, serta meningkatkan kapasitas dalam menganalisis kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan bagi perempuan khususnya.

1.3 Capaian dan Rekomendasi

Program yang berjalan di tiga kota ini meliputi Kota Pontianak, Banda Aceh dan Kabupaten Klaten telah berjalan dengan capaian yang baik. Di **Pontianak** pengerjaan advokasi ini berjejaring dengan komunitas para kader Posyandu, guru PAUD, Bidan, Organisasi Petani, Pelaksana Program PNPM dan NGO lainnya, serta jurnalis dan media lokal. Adapun hasil pendekatan politik dan lobby terhadap SKPD dan Legislatif Kota Pontianak telah berkontribusi pada turunnya bantuan pemerintah daerah berupa bantuan modal usaha dan kemudahan pengurusan perijinan usaha kecil (PIRT) dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Ada juga bantuan berupa rumah produksi, sarana dan prasarana dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak berupa terpal dan keramba untuk pengembangan tambak ikan dalam memproduksi makanan *nugget* dan sosis. Kelompok perempuan disana juga mendapatkan pelatihan internet dari PT Telkom setempat sebagai hasil rekomendasi SKPD. Pencapaian lain, kelompok perempuan bersama lembaga PPSW Borneo memperjuangkan honor kader Posyandu sebesar 1,5 juta rupiah per-orang/tahun dan masih akan diperjuangkan kembali menjadi 3 juta rupiah per-orang/tahun. Hal ini

dilakukan lewat dukungan politik lembaga DPRD Kota Pontianak. Adapun paska komunikasi dan interaksi dengan sejumlah anggota dewan daerah dalam menjalankan program ini, ada banyak tawaran kepada ibu dampingan ASPPUK untuk menjadi calon legislatif (caleg) dari Partai politik dalam pemilu 2014.

Di **Klaten**, Lobby dan negosiasi melalui lembaga PERSEPSI dengan Aria Bima (Ketua Komisi VI DPR-RI) dilakukan sejak Desember 2012, berhasil mendorong inisiasi program bantuan bagi UMKM mencapai 18 Milyar. Dari dana tersebut sebesar 2 Milyar dikucurkan bagi kabupaten Klaten berupa fasilitas permodalan usaha melalui LPDB-UMKM dari Dinas Kementrian Perindustrian dan Koperasi dan UMKM Klaten, yang diprioritaskan bagi kelompok perempuan usaha kecil dengan bunga rendah hanya 2% bagi pinjaman perseorangan, dan 6% bagi lembaga. Selain itu ada juga komitmen dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan pelatihan menjahit mengundang kelompok perempuan usaha kecil dampingan lembaga PERSEPSI. Akhirnya mendapatkan kemudahan dalam pengurusan perijinan PIRT yang biasanya sulit dan birokratis.

Diskusi dengan anggota DPRD

Di kota **Banda Aceh**, melalui komunikasi lembaga Flower Aceh dengan pihak SKPD setempat dan DPRD setempat menghasilkan MOU dengan lembaga DRPK Banda Aceh untuk bantuan bagi kelompok perempuan usaha kecil. Pemda melalui SKPD, mengalokasikan bantuan lokasi untuk usaha di daerah Ule-ule sebagai kawasan pariwisata, yang ditujukan sebagai lokasi pemasaran dan penjualan produk-produk perempuan usaha kecil. Kelompok perempuan usaha kecil juga berhasil mendapatkan bantuan paket modal usaha sebesar 50 juta dalam bentuk peralatan dari SKPD. Selain itu ada juga inisiasi berbagai pelatihan dari Disperindagkop Banda Aceh yang diperuntukkan bagi anggota kelompok perempuan usaha kecil untuk pelatihan pembuatan kue, memasak dan menjahit. Sebagai bantuan infrastruktur, gedung PKK pun diperkenankan menjadi tempat kegiatan ibu-ibu dan perempuan usaha kecil dampingan Flower Aceh.

Yang patut dicermati dalam proses menjalankan program ini, pemerintah nampak jelas kurang atau bahkan tidak membangun program perspektif kemiskinan berbasis gender. Hal ini dapat kita lihat dari minimnya data berbasis gender dalam perumusan dan penyelenggaraan pembangunan. Dalam proses pendekatan politik kepada lembaga eksekutif dan legislatif, baik dalam kegiatan dialog, h*earing* maupun *lobby* dengan pihak lembaga SKPD, DPR RI, DPRD.

Terdapat beberapa tantangan, yakni adanya paradigma yang menganggap penanggulangan kemiskinan bukan merupakan beban dan tanggung jawab pemerintah. Namun melalui rangkaian agenda temu konstituen telah menjadi pelajaran beharga bagi anggota dewan untuk melaksanakan fungsi kerjanya sebagai wakil rakyat untuk menjaring aspirasi di daerah pemilihannya.

Anggota dewan ditingkat pusat maupun daerah memiliki pengalaman yang kurang baik sebelumnya, dimana mereka seringkali dimintai dana dan proposal semata. Hal ini memunculkan perspektif yang salah mengenai pengajuan pertemuan dan dialog dari para konstituennya. Maka pentingnya meningkatkan kemampuan kelompok perempuan usaha kecil dalam membangun komunikasi dengan anggota dewan dan menganalisis kebutuhan keluarga serta lingkungannya. Tantangan lain yang muncul adalah kurangnya keberpihakan media terhadap upaya meluaskan isu-isu perempuan miskin dan usaha kecil dalam publikasi media.

Melalui hasil analisis dan pendiskusian dengan jaringan media, ternyata isu perempuan usaha kecil dan perempuan miskin kurang memiliki daya tarik peliputan media. Diperlukan pengemasan pemberitaan isu dan masalah perempuan usaha kecil serta perempuan miskin, yang dihubungkan dengan isu kontekstual agar mendapatkan porsi pemberitaan media yang lebih berpihak.

2. Penguatan Masyarakat untuk Terwujudnya Integritas dan Akuntabilitas Pemerintah

2.1 Latar Belakang

Nama program ini adalah *Strengthening Accountability and Integrity Program* atau disingkat dengan SIAP. Program ini berjalan di ASPPUK selama dua periode, yakni SIAP I yang berjalan dari tahun 2010–2012 dan berkelanjutan pada SIAP II dari tahun 2013 sampai tahun 2014. Program ini bertujuan untuk mendorong integritas dan akuntabilitas pemerintah pada tanggung jawab dasar layanan dasar publik pada masyarakat.

Program ini dijalankan secara konsorsium oleh lembaga Kemitraan, ASPPUK, Fitra, LSPP dan TIRI dengan dukungan USAID. Setiap lembaga melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mendorong terciptanya integritas dan akuntabilitas aparat pemerintah di 5 daerah. Melalui pengerjaan kegiatan di basis-basis daerah ASPPUK, tersusunlah kebijakan program dan anggaran pembangunan daerah yang akuntabel dan berintegritas dengan melibatkan kelompok perempuan dalam perumusan program pembangunan.

2.2 Kegiatan

Kegiatan secara umum adalah menyelenggarakan advokasi terhadap berbagai layanan infrastruktur publik di lima daerah, baik itu di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam pengerjaan kegiatan advokasi ini ASPPUK bersama kelompok masyarakat sipil lain telah membentuk forum integritas di 5 daerah. Kekuatan masyarakat sipil ini menjadi asset dan kekuatan guna mendorong terwujudnya pelayanan dasar publik yang bermanfaat bagi pembangunan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan selama tahun 2013, ASPPUK di nasional dan juga di daerah melalui 5 anggota LSM, telah melakukan berbagai kegiatan. Diantaranya adalah *workshop* Koordinasi dan Perencanaan, serta Assesmen kegiatan melalui FGD di 5 daerah. Kami juga menyelenggarakan *Training for Trainer (TOT)* untuk merumuskan strategi dalam mempengaruhi Kebijakan Pelayanan Publik (Pendidikan, Kesehatan dan Admindok) di nasional dan daerah. *Focus Group Discussion (FGD)* juga dilakukan sebagai penggalian usulan tentang program layanan publik di tingkat daerah. Selain itu mendorong kampanye publik melalui *talkshow* di radio dan pembuatan modul layanan publik di tingkat nasional.

2.3 Capaian dan Rekomendasi

Sejumlah program kini mulai mencerminkan kebutuhan mendesak rakyat dan kelompok rentan. Diantaranya memunculkan capaian adanya peta identifikasi temuan layanan publik di 5 daerah dan adanya isu-isu layanan publik responsif gender yang disusun secara partisipasi masyarakat di tiga bidang; meliputi pendidikan, kesehatan, dan admindok. Selain itu adanya respon positif dari pengambil kebijakan di daerah untuk menerima masukan masyarakat dalam hal pelayanan dasar. Sementara forum integritas sebagai forum lintas pelaku berusaha untuk menjadi mediator dalam penyampaian problem kelesuan pelayanan pemerintah atas layanan dasar di daerah. Selama dua tahun ASPPUK bersama konsorsium telah menanam modal sosial pembangunan daerah yang sesuai kebutuhan rakyat terutama kelompok perempuan miskin.

TOT layanan publik

Adapun capaian pelaksanaan **di Banda Aceh**, telah berupaya mendorong pertemuan lanjutan antara kelompok perempuan, lurah, camat dan anggota dewan (**DPRD Banda Aceh**) untuk membicarakan usulan perempuan tentang pasar rakyat sebagai pemasaran produk. **Di Kota Pontianak**, ada dana keberlangsungan posyandu sebesar 40 ribu perbulan yang sebelumnya tidak dikabulkan pemerintah dan rencana dibangunnya pasar rakyat tingkat kecamatan. **Di Kabupaten Karo**, anggota DPRD menerima usulan program air bersih.

Di **Kabupaten Kupang**, usulan air bersih diakomodasi meski melalui program PNPM. **Di Klaten**, usulan Perda Anti Pungutan Pendidikan telah menjadi usulan prioritas DPRD dan Pemerintah daerah, selain dana KB susuk bagi masyarakat. Meski demikian tetap masih ada kekurangan. Perlakuan aparat pemerintah dalam hal pelayanan publik masih dikeluhkan warga. Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang tertuang dalam PP 65/2005 dan Permedagri No.6/2007 belum dijalankan pemerintah

daerah. Masyarakat belum mengatahui hal ini karena minim sosialisasi aparat pemerintah.

3. Memperkuat Kapasitas Perempuan Usaha Kecil Melalui Produksi Makanan yang Berkelanjutan.

3.1 Latar Belakang

Program ini bertujuan untuk penguatan ekonomi perempuan Usaha Kecil (PUK) ASPPUK dalam peningkatan kesejahteraan perempuan melalui produksi makanan yang berkelanjutan. Selama ini masih adanya kendala yang dihadapi oleh PUK, yakni belum mampu berproduksi usaha secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas usaha. Maka melalui serangkaian kegiatan dalam program ini, harapannya akan terbangun gerakan untuk mendukung keberlanjutan produksi yang dimotori oleh Jaringan perempuan usaha kecil atau Jarpuk.

Melalui program ini ASPPUK berharap dapat membangun unit *Business Development Services* (BDS) di kalangan anggota LSM dan juga ditingkat Sekretariat Nasional untuk terus mendukung program keberlanjutan produksi PUK serta mendukung kemandirian dalam lembaga ASPPUK. Salah satu komponen yang menjadi prioritas dalam program ini adalah untuk memperkuat Lembaga Keuangan Perempuan (LKP) ASPPUK, sehingga mampu menjadi lembaga keuangan alternatif dan penyedia bahan baku dalam mendukung keberlanjutan produksi para anggotanya. Adapun kegiatan ini di dukung oleh HIVOS bekerjasama dengan Uni Eropa dam dilaksanakan di beberapa kota Indonesia, diantaranya; Kota/Kabupaten Padang, Pontianak, Ngawi, Sukoharjo dan Kendari.

3.2 Kegiatan

Sejumlah rangkaian program kegiatan telah berlangsung selama tahun 2013, diantaranya adalah pelatihan Pengembangan Usaha Komunitas dan Workshop Analisis Rantai Nilai Produk PUK pada Maret 2013. ASPPUK juga telah menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha kecil, termasuk perencanaan produksi dan keuangan, serta

Asistensi peserta dalam workshop software dan database

pengembangan standar kualitas produk pada Oktober 2013. Selain itu ada juga paket pelatihan teknis dan pengembangan produk, studi banding dan juga upaya dukungan konsultan bisnis dan *techical assistance*.

Kegiatan lain yang diadakan ditingkat nasional yakni Workshop untuk pengenalan pengembangan *software* dan instrumen *database* PUK dan monitoring LKP. Sementara itu ditingkat nasional juga telah dilakukan kajian kebijakan dan advokasi nasional dan juga menggelar display *showroom* dan pengadaan sampel produk, baik itu produk loka lokal maupun nasional. Diskusi tematik tingkat kabupaten/kota pun digelar untuk menginisiasi forum multi pihak.

Sementara untuk kegiatan kampanye, kami mendorong kampanye penggunaan poduk local melalui jejaring media sosial. Dalam program ini dirasa juga perlu memperkuat pendataan PUK dibawah naungan lembaga ASPPUK dan penyusunan *update database* profil PUK dan LKP. Hal ini ditujukan untuk persiapan penyusunan Pembuatan database produk PUK dan katalog pada tahun 2014. Kegiatan ditingkat basis PUK pun terjadi, yakni LSM anggota yang merupakan pelaksana program mengadakan pertemuan klaster secara berkala melibatkan para kader perempuan dengan *Community Organizer* (CO).

3.3 Capaian dan Rekomendasi

Sampai tahun 2013 lalu terdapat sejumlah produk PUK yang menjadi produk unggulan daerah, sebut saja Rakik Macco Badarai dari Padang, Kripik rumput laut dari Pontianak, Beras merah organik dari Kabupaten Pontianak, Abon ikan dari Kendari, Kripik singkong dari Ngawi dan Kripik usus dan kacang telur dari Sukoharjo. Untuk capaian di Ngawi telah berkembang pesat, produksi usahanya meningkat beberapa kali lipat dari produksi awal sebelum program berjalan, yakni dari 2 Kg Singkong menjadi 15 kg Singkong/minggu. Sementara di Sukoharjo, telah ada kerjasama dengan Grand Mall, Solo Square dan Hartono Mall untuk memasarkan produk-produk PUK. Untuk di

Kota Pontianak, mendapatkan bantuan program penyediaan rumah produksi oleh Dinas Perindag setempat. Sementara di Kabupaten Ngawi dan kota Kendari diberikan ruang/*booth* untuk mengikuti event pameran UKM setiap tahun di tingkat Propinsi.

Pengunjung yang sedang mengamati produk ASPPUK dalam pameran yg di selenggarakan oleh BII

ASPPUK juga mendapatkan undangan mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh pihak BII dan KEMENKOP. ASPPUK sendiri telah menampilkan berbagai hasil-hasil produk PUK seperti makanan, tenun dan kerajinan tangan lainnya. Dalam pelaksanaan program ini, Nampak terlihat adanya peningkatan pendapatan dan meningkatnya omzet dan asset PUK rata-rata sebesar 24,7 % di 6 kab/kota. Sedangkan peningkatan modal rata-rata 25,6 % dan terjadi juga peningkatan penjualan produk PUK minimal 50%. Telah terjadi pertambahan pasar baru yang ditunjukkan oleh semua PUK di 6 kab/kota, namun masih bersifat pasar lokal, misalnya bertambahnya jumlah warung yang menerima produk mereka.

Kecuali Sukoharjo yang telah melakukan perluasan pasar dengan sejumlah pusat perbelanjaan atau mal disana. Di Ngawi sendiri PUK melakukan ekspansi penjualan ke luar desa, dan PUK di Kota Pontianak menjajaki kerjasama dengan supermarket Carrefour sebagai tindaklanjut dalam kegiatan TOT nasional. PUK dan para pendamping di Ngawi juga telah melakukan dialog dengan Disperindag dan telah memasukkan proposal agar difasilitasi mengikuti pameran di Jawa Timur. Kini anggota PUK Ngawi berjumlah 245.

Namun sejauh ini belum ada BDS dari 6 kab/kota yang melakukan konsultasi komersil secara penuh. Saat ini masih dilakukan dengan *sharing* biaya dari pihak Seknas ASPPUK dan BDS dan semua PUK di 6 kab/kota masih melakukan *sharing* biaya ketika menggunakan jasa BDS. Untuk LKP sendiri belum berfungsi maksimal dalam penyedia bahan baku untuk produksi PUK. Selama ini baru menjalankan fungsi sebagai fasilitator dan mediator dalam penyediaan informasi bahan baku untuk PUK. Adapun tahun 2013 lalu ditingkat nasional telah melatih 60 orang ketua kelompok PUK

dan masing-masing ketua PUK telah melatih kelompok sebanyak 2 kali pelatihan di tingkat daerah.

Sampai saat ini telah teridentifikasi ada 29.75% PUK yang telah mengalami perkembangan usaha yang cukup baik setelah memperoleh pelatihan tekhnik peningkatan produksi, kualitas dan pengembangan produk. Disisi lain telah terbentuk forum multi pihak di 6 kabupaten/kota, dimana menjadi forum diskusi rutin dan analisa kritis terhadap kebijakan yang belum berpihak pada UMKM dan PUK. JARPUK bersama forum *multi-stakeholders* akan mengawal usulan ini agar terdanai dalam APBD. Pada tahun 2013, JARPUK juga menyusun usulan program (pra Musrembang) yang akan diusulkan dalam agenda Musrembang pada bulan Januari agar diakomodir dalam APBD 2014.

4. Program Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dari Kain Tenun-Tangan Ramah Lingkungan yang Dilakukan Perempuan Pengusaha di Indonesia

4.1 Latar Belakang

Program ini didukung oleh HIVOS dan Uni Eropa untuk mendukung proses produksi dan konsumsi tenun tangan *(hand-woven*) yang berkelanjutan. Bagaimana memperkenalkan tenun yang ramah lingkungan serta dapat menjadi peluang ekonomi bagi perempuan usaha kecil di berbagai daerah. Pengusaha perempuan ini kesemuanya adalah penenun tradisional yang mengolah tenun sebagai bagain dari aktivitas rutin sebagai adat dan juga untuk tujuan ekonomi.

Program ini berjalan di dua Negara yakni Indonesia dan Filipina. Untuk wilayah pengerjaan di Indonesia mencakup semua daerah yang memiliki kain tenun adat tradisional, diantaranya di Sumatera utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Sementara untuk di Jawa Tengah adalah kain Lurik.

Program ini berlangsung selama empat tahun, sejak tahun 2013 kemarin hingga tahun 2017. Tujuannya adalah memajukan ekonomi perempuan dan pengurangan kemiskinan di Indonesia melalui promosi kain tenun ramah lingkungan yang memiliki pengembangan rantai nilai. Adapun target program kegiatan ini mencakup sebanyak 7.000 perempuan penenun dari 220 kelompok penghasil tenun melalui 40 Koperasi. Program ini merupakan konsorsium antara ASPPUK dengan Cita Tenun Indonesia (CTI) dan juga lembaga NTFP-EP yang berbasis di Filipina.

4.2 Kegiatan

Program kegiatan yang telah terlaksana adalah workshop pemahaman dan penyusunan rencana strategis di awal program berjalan dan training pewarnaan alam dan pengenalan pemakaian bubuk dan ekstrak dari bahan pewarnaan alam di Bogor pada September 2013. Para PUK dari penenun di berbagai daerah telah dilatih dan didorong mengenal berbagai pelatihan dan pengembangan pewarnaan alam dengan dibantu oleh Ahli pewarna alam, yakni Henry Suprapto.

Kegiatan pengembangan produksi pewarnaan alam ini bersifat ramah lingkungan dan menyesuaikan standar tenun internasional yang ramah lingkungan ini juga didukung oleh ahli pewarna alam dari Filipina, sebagai upaya perbandingan metode. Dalam kegiatan ini telah mulai membangun kerjasama antara kelompok penenun dengan koperasi dan mendiskusikan kerja dan jalur distribusi tenun di nasional dan luar negri. Kegiatan lain yang juga telah berjalan yakni adanya kampanye tenun ramah lingkungan dan upaya mendorong jalur pemasaran.

Peserta TOT sedang mempraktekkan tehnik pencelupan dengan menggunakan pewarnaan alam

4.3 Capaian

Salah satu bahan alami yg di gunakan dalam TOT pewarnaan alam

Sejauh ini berbagai kelompok perempuan penenun telah dilatih ditingkat daerah untuk memahami dan mengenali program ini bagi tujuan yang lebih strategis, yakni pengembangan tenun pewarna alam yang ramah lingkungan. Replikasi metode menciptakan bahan pewarna alam telah dilakukan ditingkat nasional sampai daerah. Bagaimana limbah tanaman dan buah ternyata bisa menjadi bahan baku dalam memproduksi tenun ramah lingkungan. Sebut saja menggunakan kulit rambutan, kayu, rumput putri malu, kunyit dll. Memahami bahwa proses tenun juga bisa didorong sebagai akses untuk pemberdayaan ekonomi bagi para perempuan penenun yang masih bertahan mempertahankan tradisi.

Pengenalan pada berbagai sumberdaya alam botani dan ragam tanaman di negri ini akan menjadi bagian dalam pengembangan sumber pewarna alam yang berkelanjutan. Harapan Seknas ASPPUK kedepan akan lebih banyak praktek pembuatan tenun pewarna alam yang dapat dikembangkan ditengah masyarakat khususnya para penenun perempuan ini, termasuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan konferensi, perdagangan dan pameran dengan terlibat bersama pihak pemerintah RI. Target kedepan adalah bagaimana olahan tenun ini dapat diproduksi dalam berbagai produk jadi dan dapat diekspor keluar negri, khususnya ke Eropa.

5. Mendorong Kebijakan Ekonomi Kerakyatan yang Resonsif gender untuk Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Miskin melalui Penguatan Multi-*stakeholders* yang berpihak

5.1 Latar Belakang

Program ini adalah berangkat dari keyataan adanya tingkat kemiskinan masyarakat yang tak kunjung turun presentasinya. Keprihatinan terhadap anggaran belanja APBD untuk mengatasi problem ketidak-adilan gender yang tidak memadai. Tidak terintegrasinya program dan kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat, serta minimnya pengawasan legislatif baik di tingkat penyusunan dan implementasi di lapangan, menggambarkan kelemahan peran legislatif dan eksekutif.

Dalam strategi mewujudkan visi misinya, ASPPUK berkolaborasi secara sinergi dengan *multi-stakeholders,* baik itu pemerintah (pusat-daerah), Lembaga Legislatif (pusat-daerah), pemerhati ekonomi kerakyatan di tingkat lokal dan nasional dan khususnya melibatkan berbagai kelompok perempuan usaha kecil ASPPUK untuk memperkuat upaya program pengurangan kemiskinan.

5.2 Kegiatan

Kegiatan ini berjalan selama dua tahun sejak tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2015 mendatang melibatkan anggota LSM di 4 wilayah dan di semua wilayah melibatkan Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) binaan ASPPUK. Di wilayah Sumatera program ini diinisiasi oleh lembaga LPSELH di Aceh Utara dan BITRA di kota Medan, lembaga PPSW Pasoendan di Jawa Barat dan LPPLSH di Jawa Tengah. Wilayah Sulawesi diinisiasi oleh lembaga ALPEN SULTRA di Kendari dan LML di Makassar, sementara di NTB diinisiasi oleh lembaga Panca Karsa di Mataram. Kegiatan yang diusulkan akan melibatkan jaringan ASPPUK dari desa, kabupaten, propinsi hingga nasional.

Presentasi peserta dalam workshop penyusunan kebijakan ekonomi kerakyatan

Program ini didukung oleh Ford Foundation. Dalam implementasi kegiatan di tahun 2013 ASPPUK telah menyelenggarakan beberapa kegiatan, diantaranya *workshop* penyusunan analisis dokumen dan riset pengembangan usaha kecil di empat daerah sebagai *pilot project* untuk mendorong rumusan kebijakan.

Dalam kegiatan analisa dokumen ini mengkaji dokumen APBD dan APBN terkait pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan. Informasi ini dianalisa dengan menggunakan analisa *pro-poor budgeting* dengan menggunakan strategi advokasi anggaran berbasis bukti *(Evidence Based Budgeting Advocacy)*. Analisa dokumen dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota agar lebih fokus di daerah wilayah kerja.

5.3 Capaian dan Rekomendasi

Dari beberapa komponen kegiatan tersebut dan riset awal yang telah dilakukan oleh konsultan ASPPUK, terpetakan kendala dan kesulitan yang ditemui oleh anggota dan Kelompok Perempuan Usaha Kecil (PUK). Problem lain yakni adanya kebijakan dan implementasi program ekonomi rakyat dari pemerintah daerah yang belum berjalan maksimal ditingkat bawah. Pemerintah memaknai program ekonomi rakyat hanya pada penyelenggaraan pameran dan belum pada pembinaan perempuan usaha kecil yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Maka sangat diperlukan untuk melakukan pendekatan politik kepada para pihak dinas SKPD di masing-masing daerah untuk mendorong kegiatan ini. Termasuk merumuskan konsep pemasaran yang akan dilakukan dan dimanajemeni oleh Sekretariat Nasional ASPPUK.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Pra-Sejahtera Melalui Bantuan Modal Bagi Perempuan Usaha Kecil (PUK)

6.1 Latar Belakang

Program kemitraan antara Bank Internasional Indonesia (BII) dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil-ASPPUK ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera di Indonesia. Khususnya perempuan di wilayah Provinsi Sumatra Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana hibah untuk penyediaan fasilitas kredit modal kerja yang akan digunakan untuk mendirikan program usaha kecil. Diharapkan usaha tersebut dapat memberikan kesejahteraan yang berkesinambungan bagi Perempuan Usaha Kecil ASPPUK. Program ini berjalan untuk jangka waktu 3 tahun dan BII berkeinginan untuk melakukan kegiatan di bidang sosial dan kemanusiaan, dalam hal ini menjadikan lembaga ASPPUK sebagai mitra.

6.2 Kegiatan

Pada 9 Desember 2013, Sekretariat Nasional ASPPUK telah menandatangani program kerjasama pengelolaan dana CSR dengan Bank BII di Benteng Rotterdam Makasar, Sulawesi Selatan. Progres dan ril kerjasama ini akan berjalan dari tahun 2014-2016 Dalam kerjasama implementasi program CSR, ASPPUK bertanggung-jawab untuk melakukan seleksi terhadap anggota Perempuan Usaha kecil yang dianggap layak untuk memperoleh, maupun memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan fasilitas modal kerja melalui mekanisme Lembaga Keuangan Perempuan (LKP) yang telah menjadi prioritas program ASPPUK di daerah.

Penandatanganan kontrak kerjasama antara BII dengan ASPPUK

Dalam kerjasama ini ASPPUK bertanggung-jawab untuk mendampingi, membimbing, membantu dan mengawasi peserta program dalam menjalankan usaha yang dibangunnya. Selain itu ASPPUK juga bertanggungjawab untuk memberikan pengarahan kepada peserta program untuk memilih kegiatan usaha yang dapat memberikan keuntungan, namun tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) akan memanfaatkan fasilitas modal kerja untuk peningkatan kesejahteraan kelompok perempuan usaha kecil mikro melalui jasa pengembalian yang tidak memberatkan yaitu berkisar antara 1-1,5 % dan bersifat tetap setiap bulan.

6.3 Capaian dan Rekomendasi

Sejauh ini Sekretariat Nasional ASPPUK masih akan memetakan daerah-daerah pelaksanaan program ini sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan kegiatan di masing-masing daerah. Selain itu Seknas ASPPUK juga akan merencanakan pengembangan produk olahan tenun dan produk makanan PUK, yang akan dikelola secara nasional untuk mendorong proses produksi dan pemasaran produk PUK. Kebutuhan untuk menjangkau tingkat penjualan produksi juga dipertimbangan dalam program ini kedepan dengan membuka gallery atau toko untuk mengakomodasi multi produk ASPPUK dari berbagai dampingan di Indonesia.

7. Advokasi dan Jaringan

7.1 Undang-undang KOPERASI No. 17 Tahun 2012

Kebijakan pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Koperasi No 17 pada tahun 2012 adalah suatu tindakan ceroboh dan sangat disayangkan. Melalui kebijakan dalam UU tersebut, ASPPUK menilai adanya kecenderungan melemahkan perkembangan ekonomi rakyat di sektor kecil-mikro, yang sesungguhnya merupakan fundamen ekonomi di negri ini. Dimana koperasi ini menjadi salah satu lembaga sumber permodalan bagi usaha mikro kecil dan antara keduanya memiliki relasi yang sangat erat.

Dengan demikian Seknas ASPPUK aktif menggagas sebuah koalisi masyarakat sipil untuk melakukan advokasi terhadap UU Koperasi No 17/2012. Terbentuklah **Koalisi Demokratisasi Ekonomi** yang merupakan gabungan lembaga swadaya masyarakat yang aktif mendampingi berbagai kelompok usaha ekonomi rakyat dan koperasi di berbagai daerah. Melalui UU Koperasi baru tahun 2012 ini pemerintah nampaknya berupaya untuk melakukan upaya peningkatan Koperasi melalui pendekatan modal. Solusi modal tersebut melalui pinjaman modal kepada *stakeholder/investor* dari luar anggota Koperasi dan bukan pada penguatan gerakan sosial Koperasi sebagai wadah perkumpulan ekonomi rakyat.

Menurut ASPPUK, membangun ekonomi rakyat harusnya dilakukan dengan upaya menginkorporasikan seluruh kekuatan ekonomi di masyarakat secara integratif dari hulu dan hilir, dari sektor produksi sampai ke jalur distribusi dan konsumsi secara nasional. Upaya pemerintah menjadikan Koperasi sebagai Badan Hukum dalam UU baru ini adalah sebuah bentuk korporatisasi koperasi atau upaya menjadikan koperasi layaknya badan hukum perusahaan. ASPPUK memandang hal ini bertentangan dengan cita-cita ideologi bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 dan menyimpang dari substansi demokrasi ekonomi atas asas kekeluargaan yang diatur dalam dalam Pasal 33 UUD 1945.

Koperasi harusnya ditempatkan sebagai bangunan sistem organisasi yang mandiri, demokratis dan menjunjung tinggi supremasi anggota. Secara umum, UU Perkoperasian yang baru potensi merusak otonomi dan juga mengganggu berjalannya demokrasi koperasi yang merupakan jatidiri dari koperasi Indonesia yang merupakan organisasi perkumpulan orang *(people based association)* dan bukan perkumpulan modal *(capital base association)*.

Dari beberapa pasal yang bermasalah dalam UU Koperasi No 17 Tahun 2012 ini, ASPPUK bersama Koalisi Demokratisasi Ekonomi memfokuskan kepada 4 pasal yang kami uji materikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Keempat pasat tersebut adalah;

1. Pasal Definisi (Pasal 1)
2. Pasal Wewenang Pengurus dan Pengawas (Pasal 50 - 65)
3. Pasal Modal Penyertaan (Pasal 66 - 77)
4. Pasal Dekopin/Dewan Koperasi Indonesia (Pasal 115 – 116).

Keempat pasal dalam UU Koperasi baru tersebut telah merusak tatanan, nilai, prinsip dan jati diri Koperasi Indonesia yang dilandasi oleh semangat perekonomian rakyat, kekeluargaan, kemandirian dan keadilan. Hasil pengkajian kami terhadap keseluruhan UU tersebut, kami melihat pemerintah ingin membawa gerakan ekonomi koperasi masuk dalam tatanan sistem ekonomi Liberal-Kapitalisme, yang berpotensi merusak gerakan ekonomi rakyat kecil di berbagai daerah/desa di seluruh Indonesia.

Prinsip Koperasi yang menjunjung kedaulatan anggota sebagai *stakeholder* utamanya, kemudian akan digantikan dengan otoritas badan pengawas dan modal penyertaan dari pihak luar sebagai investor. Kami menyebut upaya ini menciptakan "korporatisasi koperasi" dalam tubuh gerakan-gerakan Koperasi di Indonesia kedepan.

7.1.1 Koalisi Demokratisasi Ekonomi

Dalam pengerjaan advokasi UU Koperasi No 17 Tahun 2012 tersebut diatas, ASPPUK menginisiasi sebuah jejaring koalisi nasional yang bernama Demokratisasi Ekonomi dengan melibatkan organisasi dan lembaga yang befokus pada isu dan implementasi koperasi di Indonesia. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH-Jakarta) selaku kuasa hukum.

Lembaga dan organisasi lainnya yakni yang melakukan pendampingan komunitas seperti; Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), Institut Kapal Perempuan, Bina Desa (Bindes), Bina Swadaya Konsultan, Lembaga pengkajian dan Pengembangan Koperasi (Leppek), Institute for Global Justice (IGJ) dan lembaga PRAKARSA. Tergagaslah sebuah jaringan kerja advokasi bernama **Koalisi Demokratisasi Ekonomi.**

Pendaftaran berkas judicial review UU koperasi no.12 tahun 2012 ke MK (mahkamah konstitusi)

Semua anggota koalisi dan mendaftarkan permohonan *Judicial Review* terhadap UU Koperasi No. 17 Tahun 2012 ke **Mahkamah Konstitusi (MK)** tertanggal 15 Mei 2013 dengan no perkara No. 60/PUU-XI/2013. Dengan mengajukan 4 pasal dalam UU Koperasi No 17 tersebut yang berpotensi merusak tatanan, nilai, prinsip dan jati diri koperasi Indonesia yang dilandasi oleh semangat perekonomian rakyat, kekeluargaan, kemandirian dan keadilan.

Dalam proses kegiatan penyusunan kertas posisi, koalisi turut melibatkan pakar ekonomi dan praktisi UMKM, yakni **Prof. Dawam Rahardjo** dan **Bambang Ismawan**. Adapun sebagai saksi ahli dalam persidangan di MK menghadirkan saksi

ahli bernama **DR. Robby Tulus** sebagai *founder* dari **Credit Union Indonesia**. Melalui serangkaian kegiatan, baik diskusi dan pertemuan, jaringan kerja Koalisi Demokratisasi Ekonomi berupaya mendorong upaya perluasan isu dan masalah perempuan miskin dan perempuan usaha kecil khususnya.

Melalui koalisi ini Sekretariat Nasional ASPPUK mengkonsolidasikan dan membangun jaringan yang berkelanjutan, swadaya dan mandiri untuk memperjuangkan isu pengembangan kesejahteraan perempuan miskin melalui pengembangan Koperasi.

Pada 28 Mei 2014, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan Persidangan putusan terhadap UU Koperasi No 17 Tahun 2012 dan UU tersebut dinyatakan dibatalkan demi hukum. Dalam pemaparan argumentasi para Hakim MK, UU Koperasi baru ini akan merubah dan berpotensi merusak sistem koperasi di Indonesia, bahwa prinsip dan nilai Koperasi adalah perkumpulan orang dan bukan soal modal semata. Keputusan MK ini merupakan sikap keberpihakan terhadap Koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat.

7.2 Koalisi Gerakan Rakyat Lawan WTO (GERAK LAWAN WTO)

Koalisi ini merespon pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke 9 *World Trade Organization* atau biasa disingkat WTO, pada 3-6 Desember 2013. Koalisi masyarakat sipil dalam Gerak lawan WTO ini menyatakan bahwa kehadiran WTO sejak berdiri resmi pada tahun 1995 hingga kini, telah gagal mensejahterakan negara-negara anggotanya melalui perdagangan internasional. Sejumlah regulasi yang dikeluarkan WTO lebih banyak menguntungkan negara-negara maju saja dan malah menciptakan krisis global yang kian intensif.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya krisis harga pangan, energi, pemanasan global/iklim serta sistem keuangan internasional yang semakin buruk. Harga pangan yang tidak stabil, ketergantungan Negara miskin atas impor meningkat dan *land grabbing* yang meluas. Yang menjadi poin kritisi ASPPUK adalah, melalui kehadiran lembaga WTO ini telah berkontribusi menghancurkan sektor ekonomi rakyat yang diperankan oleh ekonomi non-formal. Sebaliknya perusahaan pangan dan pertanian trans-nasional yang berbasiskan pada modal asing, semakin kuat meraup laba.

Melalui perjanjian dalam WTO ini negara-negara terbelakang (*Least developed countries/LDCs*) dan negara-negara berkembang seperti Indonesia, Philipina, Thailand, Vietnam dan lainnya, malah kehilangan kedaulatan untuk melaksanakan kebijakan pertanian. Aturan untuk menerapkan Liberalisasi dan deregulasi di sektor pertanian, hanya menguntungkan korporasi pangan dan pertanian global. Maka koalisi Gerak Lawan WTO yang semula digagas oleh *Institute for Global Justice (IGJ)* dan ASPPUK terlibat penuh, menuntut pemeritah RI agar keluar dari kesepakatan WTO karena mengancam sektor pertanian negara-negara berkembang. Bahwa saatnya bagi Indonesia untuk mengupayakan kebijakan demokrasi ekonomi dan kedaulatan pangan bangsa.

Pertemuan KTM IX WTO di Bali pada Desember 2013 memiliki tiga agenda utama yang disebut Paket Bali. Yakni terdiri dari *Least Development Countries* (LDCs) Packages, *Trade Facilitation* dan isu pertanian, serta isu-isu lain seperti *Government Procurement Agreement (GPA*), *Information Technology Agreement (ITA)* dan *Trade Capacity Building*. Koalisi Gerak Lawan WTO ini juga merupakan kerjasama dengan koalisi dengan semangat yang sama di tingkat Asia, yakni *Solidarity Movement for Asia Alternative* (SMAA) suatu koalisi.

Adapun agenda puncak koalisi Gerak Lawan di Bali yakni menggelar konferesi internasional tandingan, yakni konferensi Anti-WTO pada saat yang bersamaan dengan konferensi WTO di Bali pada Desember 2013 lalu. Dalam konferensi internasional ini diikuti oleh berbagai perwakilan organisasi LSM di Indonesia dan juga Asia. Dalam kegiatan konferensi ini menganalisis dan merumuskan berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan budaya yang diakibatkan oleh WTO di berbagai negara miskin di dunia. Serangkaian agenda Gerak Lawan ini terdiri dari deklarasi, aksi damai dan panggung musik. Digelar juga sebuah sidang Pengadilan Rakyat sebagai sebuah simulasi pengadilan internasional atas berbagai dampak buruk kebijakan WTO di semua sektor kehidupan masyarakat di dunia.

Adapun berbagai Organisasi yang tergabung dalam koalisi ini diantaranya adalah Indonesia for Global Justice (IGJ), Bina Desa, Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan (SP), Aliansi Petani Indonesia (API), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak

Kekerasan (KONTRAS), Koalisi Anti Utang (KAU), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), AJI Jakarta (Aliansi Jurnalis Independen), LS-ADI (Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia), SNI (Serikat Nelayan Indonesia), KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia), SBI (Serikat Buruh Indonesia*),* PBHI Jakarta (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia).

7.3 Mendorong Program Pembangunan Post MDG's Indonesia.

Millinenum Development Goals atau yang umum disingkat *MDG's* akan berakhir pada tahun 2015. MDG's merupakan kesepakatan pembangunan internasional dalam upaya mendorong kemajuan di berbagai aspek pembangunan, seperti di bidang pendidikan dan pengurangan kemiskinan. Terdapat 8 capaian gol MDG's, namun sejauh ini program ini belum mampu mengatasi berbagai masalah pembangunan di Indonesia. Pada tahun 2012 lalu, berbagai lembaga *NGO* di Indonesia bersepakat untuk membentuk koalisi yang bernama **Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembangunan Berkeadilan.**

ASPPUK aktif dalam koalisi mengambil bagian dalam isu ketimpangan, khususnya dalam pengembangan ekonomi rakyat. Dalam pengamatan koalisi ini, pendekatan MDG's ini dipandang lebih mendorong negara miskin dan berkembang, ketimbang menagih tanggung jawab negara maju dan tidak peka terhadap kesenjangan yang timbul dalam pembangunan yang berjalan selama ini. Kerangka pembangunan *post* MDG's kedepan harus belajar dari kemajuan dan kelemahan, guna tidak mengulangi kelemahan dalam penyusunan dokumen MDG's.

Berbagai kegiatan pada tahun 2013 lalu diantaranya menyelenggarakan konferensi pers posisi politik masyarakat sipil terhadap *Post-MDG's* dan pembuatan laporan masyarakat sipil Indonesia yang jadi usulan untuk pertemuan *High-Level Panel of Eminent Persons (*HLP-EP*)* untuk perumusan *Post-MDG's* pada Januari –

Februari 2013. ASPPUK juga terlibat dalam *side-event* untuk *High-Level Panel of Eminent Persons (*HLP-EP*) on the Post-2015 Development Agenda* bersama masyarakat sipil sedunia pada 23-24 Maret 2013 di Bali.

Setelah pertemuan *High-Level Panel* di Bali pada Maret 2013 tersebut, PBB kemudian mengeluarkan hasil dokumen pada tanggal 30 Mei 2013 berjudul "Sebuah Kemitraan Global Yang Baru: Hapuskan Kemiskinan dan Transformasikan Ekonomi Melalui Pembangunan Berkelanjutan". Dalam kacamata koalisi, dokumen resmi hasil usulan HLP-EP memiliki capaian positif, tapi menyisakan sejumlah poin kritik, yakni minim perspektif HAM dan perspektif inklusi dalam agenda pencapaian pembangunan.

Dalam pengembangan ekonomi sektor informal, ASPPUK mendorong HLP-EP untuk menyoroti skema-skema perdagangan, khususnya yang menyangkut usaha dan produk dari kalangan UMKM, agar tidak berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. ASPPUK menilai pentingnya kebijakan yang akan dihasilkan dokumen *post-MDG's* karena akan mempengaruhi perempuan usaha kecil-mikro yang menjadi dampingan 54 anggota LSM ASPPUK di berbagai daerah Indonesia.

7.4 Jaringan Fundraising dan Corporate Social Responsibility (CSR)

Jaringan ini pada awalnya dimulai dengan kepedulian beberapa LSM, khususnya yang berada di Jakarta pada tahun 2012. Beberapa organisasi swadaya ini memberikan respon dalam melihat praktek-praktek yang berkembang terkait isu *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Kegiatan diskusi tentang CSR dan Strategi Fundraising

Beberapa organisasi lembaga swadaya tersebut diantaranya ASPPUK, PEKKA, JASS, PPSW Jakarta, PPSW Pasoendan, ACE, dan Konsil LSM Indonesia. Dalam pendiskusian di Koalisi, CSR dianggap belum diterapkan sebagaimana yang seharusnya. Seperti persoalan-persoalan berikut:

Korporasi yang berperan menjalankan program CSR-nya sendiri, CSR yang tidak tepat sasaran, CSR hanya sebagai pencitraan, kerentanan CSR yang dimanfaatkan kelompok/institusi yang dekat dengan kekuasaan, misalnya di kalangan pemerintah, maupun oleh Partai politik, sebagai akibat belum adanya regulasi pengelolalaan CSR di Indonesial.

Dalam perjalanan koalisi jaringan selanjutnya, telah berkembang tidak saja menyoal tentang potensi keberadaan CSR yang besar di masyarakat, tetapi juga mulai menggagas ide-ide kreatif, khususnya di kalangan NGO untuk mengembangkan strategi *fund raising*.

Meski jaringan ini masih pada tahap rintisan, setidaknya jaringan ini merupakan peluang bagi ASPPUK khususnya untuk menambah pengetahuan terkait isu-isu CSR. ASPPUK menyadari masih lemahnya pemahaman dan pengetahuan tentang CSR dan strategi *fund raising*. Keterlibatan ASPPUK dalan jaringan ini, diharapkan untuk dapat meningkatkan kapasitas, menambah jejaring dengan para pelaku bisnis (korporat), legislatif dan kalangan pemerintah terkait untuk bersinergi, salah satunya dalam mendorong keberdayaan masyarakat

7.5 Pendidikan dan Public Services (Network for Education Watch Indonesia)

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Kegagalan pembangunan di bidang pendidikan akan sangat berdampak luas, seperti memunculkan masalah kemiskinan, rendahnya SDM, kesehatan, kiriminalitas dan dampak sosial lainnya. Meskipun sektor pendidikan sesungguhnya memiliki peran yang strategis dalam masyarakat, namun kondisi perkembangan pendidikan di Indonesia masih jauh dari memadai, khususnya hak dan akses pendidikan untuk perempuan.

Dari data **Statistik Gender BPS 2011** menunjukkan hal berikut; dari 100 penduduk perempuan usia lebih dari > 10 tahun, yang buta huruf 8 orang. Pada usia lebih dari > 15 tahun, ada sebanyak 9 orang buta huruf. Sementara itu dari 100 penduduk laki-laki, yang buta huruf 4 orang. Pada usia lebih dari > 15 tahun ada sebanyak 5 orang yang

buta huruf. Data ini menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam bidang pendidikan.

Kegitan Jambore anak yang berlangsung di TMII

Koalisi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (*Network for Education Watch Indonesia*) menilai bahwa secara umum pendidikan perempuan masih sangat lemah. Rendahnya pendidikan ini akan berdampak pada kualitas kehidupan perempuan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Dalam keterkaitan dengan kehidupan ekonomi dan usaha, jika sumberdaya mereka lemah tentu akan berpengaruh pada kualitas usaha yang mereka geluti dan juga di bidang lain.

Keterlibatan ASPPUK pada Jaringan Pemantau Pendidikan di Indonesia melalui *New Indonesia* ini, merupakan salah satu upaya ASPPUK untuk melakukan advokasi bersama untuk meningkatkan akses perempuan dalam sektor pendidikan. Beberapa kegiatan dalam jaringan ini diantaranya melakukan advokasi melalui kampanye media talkshow, *global action week,* diskusi, aksi gugatan UU Sisdiknas 2003 dan lobi.

7.6 Kewirausahaan Sosial Berbasis Komunitas

Sekretariat Nasional ASPPUK sangat mendukung munculnya sejumlah kegiatan dan kompetisi wirausaha berbasis sosial yang diselenggarakan berbagai lembaga di Indonesia, khususnya yang digagas oleh lembaga **British Council Indonesia**. Program pengembangan kewirausahaan sosial sangat penting untuk terus didorong dan dikembangkan sebagai upaya membangun peningkatan wirausaha berbasis komunitas dalam masyarakat. Secara khusus perlunya meluaskan kesempatan dan dukungan munculnya kelompok-kelompok wirausaha berbasis sosial bagi kelompok perempuan usaha kecil di Indonesia.

ASPPUK melihat komitmen ini ditunjukkan dengan baik oleh Bristish Council Indonesia yang telah aktif selama beberapa tahun menggagas workshop, training

maupun dan kompetisi wirausaha dari berbagai kalangan usaha kecil di Indonesia. Lewat program *Competition Entrepreneur Challenge (CEC)* gelombang IV yang diselenggarakan oleh British Council Indonesia, ASPPUK mendukung dan mendorong program ini dan terlibat dalam persiapan sosialisasi program CEC IV di kota Pontianak dan Jakarta sejak pertengahan tahun 2013.

Upaya berbagi gagasan, komunikasi dan kerjasama pengembangan kewirausahaan sosial berbasis komunitas ini, intens dilakukan oleh Seknas ASPPUK dengan *program manager* British Council Indonesia, yakni Ari Sutanti. Sebagai upaya meluaskan kegiatan wirausaha sosial ini agar dapat diikuti oleh berbagai kelompok perempuan usaha kecil di Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur, Maka ASPPUK mensosialisasikan luas program ini keberbagai anggota *NGO* di berbagai daerah Indonesia. Ada keterlibatan komunitas dari beberapa lembaga anggota ASPPUK dalam kegiatan Kompetisi Usaha Sosial ini, yakni dari Sanggau dan Pontianak di Kalimantan Barat, Klaten, Padang dan Pontianak yang turut berpartisipasi dalam berbagai kategori usaha.

Dalam proses semifinal pada Maret 2014 ada dua anggota ASPPUK yang lolos, pertama adalah Komunitas Dayak Iban (PRCF) di Sanggau, Kalimantan Barat dengan usaha tenun pewarnaan alami. Kedua, ALPEN Sulawesi Tenggara untuk usaha Abon Ikan. Dalam seleksi final pada Mei 2014 menyisakan Kelompok Tenun Dayang Sanggau, Kalimantan Barat sebagai finalis Top 10. Dalam seleksi final, akhirnya keluar sebagai Juara III dan mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 100.000.000. Pemenang yang tepilih dalam kompetisi CEC IV ini berhak mendapatkan dana hibah usaha, dukungan promosi, kampanye media film dan akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan pameran dibawah binaan British Council Indonesia.

8. Pengembangan Media, Database dan Komunikasi

8.1 Publikasi Situs (Website)

Adanya berita PUK-mikro melalui situs atau Website ASPPUK. Website menjadi salah satu media yang selalu dimanfaatkan oleh ASPPUK dalam meningkatkan penyebaran informasi, baik ke dalam anggota jaringan maupun pihak-pihak di luar asosiasi.

Melalui penggunaan media website, biaya untuk diseminasi informasi menjadi lebih murah dan menjangkau lebih luas. Website ASPPUK selain bermanfaat menyebarkan informasi terkait isu-isu pengembangan usaha mikro kecil, juga membantu jejaring di daerah untuk menyampaikan kabar perkembangan wilayah terkait program pemberdayaan usaha mikro kecil dan kesadaran kritis perempuan serta kebijakan ekonomi lokal. Adapun sebaran anggota APPUK cukup luas, yaitu meliputi 22 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Melaui website, berbagai anggota ASPPUK di berbagai daerah yang belum memiliki website, dapat mengabarkan berita-berita terkait info PUK (perempuan usaha kecil), perkembangan program dan isu-isu lain terkait pemberdayaan perempuan. Mekanisme yang digunakan dalam internal awalnya melalui mailing list asppukforum@asppuk.or.id untuk kemudian oleh Sekretariat nasional ASPPUK menggunggahnya ke Website melalui petugas Information Technology (IT) yang telah ditunjuk sebagai administrator.

Selain website, ASPPUK juga memanfaatkan media sosial facebook dan twitter. Media sosial tersebut dihubungkan secara langsung dengan situs ASPPUK yakni www.asppuk.or.id untuk memudahkan anggota ataupun komunitas online di luar jejaring ASPPUK dalam mengakses berita-berita ASPPUK. Dengan adanya media sosial ini telah membantu ASPPUK dan anggota dalam menyebarkan isu-isu terkait usaha mikro kecil.

Berikut ini adalah link ASPPUK di jejaring sosial facebook *www.facebook.com/asppuk* dan Twitter @asppuk.

8.2 Pengembangan Video Dokumenter

Pembuatan Video dokumenter memiliki peranan penting sebagai alat pendukung kerja advokasi. ASPPUK dalam hal ini mulai mengembangkan media visual (video) sebagai sarana untuk mendokumentasikan kerja-kerja organisasi, peningkatan kapasitas dan kampanye publik. Proses pembuatan video ini dikembangkan oleh Divisi IT Seknas ASPPUK. Adapun beberapa video dokumenter yang berhasil diproduksi sepanjang sejak tahun 2012-2013 adalah sebagai berikut:

Salah satu aktor yang ada dalam video 'berubah dari bawah'

1. Video dengan judul " Berubah dari Bawah"

Video ini menceritakan peranan perempuan basis (PUK dan komunitas lokal) yang berjuang untuk mendorong penegakan integritas pemerintah dalam mendorong kebijakan-kebijakan lokal yang lebih pro perempuan.

2. Video "Perempuan Usaha Kecil Menuju Sejahtera"

Video ini merupakan profil ASPPUK dan bercerita tentang pengalaman dan strategi ASPPUK dalam melakukan pendampingan terhadap Perempuan Usaha Kecil (PUK). Video ini juga menggambarkan beberapa aktivitas PUK di lapangan serta cerita-cerita sukses PUK.

Salah satu actor yang ada dalam video 'perempuan usaha kecil menuju sejahtera'

3. Tutorial "Proses Pembuatan Warna Alami untuk Tenun Tangan"

Video ini merupakan perekaman terhadap proses pembuatan warna alami untuk tenun tangan yang diselenggarakan dalam training tenun pewarnaan alam yang diselenggarakan pada tahun 2013 oleh Seknas ASPPUK.

8.3 Pengembangan software untuk Database Perempuan Usaha Kecil-mikro

Untuk mendorong pengembangan Lembaga Keuangan Perempuan (LKP) dan data base Pelaku Usaha Kecil (PUK) yang terdapat diberbagai daerah, maka Seknas ASPPUK menyusun pengembangan program komputer atau software yang diiterintegrasikan secara nasional. Adanya pengembangan software ini dimaksudkan untuk memudahkan kerja-kerja jaringan baik antara ASPPUK – LSM Anggota dan JARPUK dalam memantau perkembangan LKP dan perkembangan usaha PUK.

8.4 Publikasi Buku

Sebagai sarana untuk managemeni pengetahuan, ASPPUK memandang penting untuk selalu mendokumentasikan hasil kerja-kerja organisasi melalui berbargai media. Buku menjadi salah satu pilihan ASPPUK untuk pendokumentasian penyebaran informasi, penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan.

Berikut ini adalah beberapa buku yang berhasil diterbitkan oleh Sekretariat Nasional ASPPUK yang telah dipersiapkan dari periode tahun 2011 hingga ke tahun 2013.

1. **"Aku Dalam Gerak"**

Buku ini terbit pada tahun 2011, bertutur tentang refleksi penggiat masyarakat dalam jaringan ASPPUK dalam membangun kesadaran kritis perempuan dan gender. Buku ini diterbitkan melalui jaringan ASPPUk di wilayah Jawa.

2. **"Katanya Menggugat"**

Buku ini pada tahun 2011 ditulis oleh para pendamping PUK di wilayah Jawa yang bercerita tentang pengalamannya selama bergelut dengan

pelaku usaha kecil mikro di komunitasnya. Buku ini juga mengulas situasi ekonomi lokal yang semakin tergerus oleh ancaman-acaman persaingan usaha. Juga memaparkan lemahnya dukungan pemerintah dalam kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada perempuan usaha kecil. Buku ini juga diterbitkan melalui jaringan ASPPUK di wilayah Jawa.

3. **"Pada Kerja Kami Percaya"**

Buku Ketiga ini diterbitkan pada tahun 2012. Mengungkap cerita tentang pengalaman-pengalaman para pendamping PUK dan cerita sukses para Perempuan Usaha Kecil (PUK). Buku ini juga berisikan bagaimana strategi pendampingan ASPPUK dalam pengembangan usaha PUK.

4. **"Kisah Perempuan di 5 daerah"**

Buku ini diterbitkan pada tahun 2012, menceritakan peranan perempuan basis (PUK) dan komunitas lokal yang berjuang untuk mendorong penegakan integritas pemerintah daerah melalui kebijakan-kebijakan yang lebih pro perempuan.

5. **"Mengakhiri Ketergantungan Membuka Jendela Dunia"**

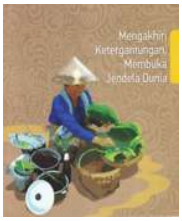

Buku ini dicetak pada tahun 2013 dan bertutur tentang pengalaman-pengalaman PUK dalam menghadapi tantangan usaha yang saat ini semakin tajam.Menceritakan bagaiman pergelutan PUK dengan keterbatasan sumber daya, baik dalam modal, keterampilan, akses pasar, dan kendala lainnya. Namun mereka tetap berjuang demi untuk mempertahakan usahanya dan kesejahteraan keluarganya ditengah persaingan ekonomi global dan iklim usaha yang sangat tidak kondusif bagi mereka.

LAPORAN KEUANGAN 2013